



PEMBERANTASAN KORUPSI

Temuan TII Bisa untuk Benahi Instansi Pemerintah

YOGYAKARTA, KOMPAS – Indeks persepsi korupsi dan indeks suap, yang merupakan hasil survei seperti yang dilakukan Transparency International Indonesia, sebenarnya bisa menjadi alat pengingat (*counter*) bagi pimpinan instansi pemerintah yang laporannya asal bunyi.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Antikorupsi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Gunawan S, masih banyak instansi pemerintah yang belum menyadari apa yang diinginkan Presiden untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi sekaligus melaporkan hasilnya.

"Faktanya, pelaksanaan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 5 Tahun 2004 (tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi) tidak diungkapkan (oleh instansi pemerintah). Hasilnya pun tidak selalu terungkap dalam laporan pelaksanaan inpres," ujar Gunawan, dalam Sosialisasi IPK 2008 dan Indeks Suap yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), Selasa (27/1) di Yogyakarta.

Pekan lalu, TII mengungkapkan hasil survei tentang indeks

persepsi korupsi (IPK) terhadap 50 kota dan indeks suap di 15 institusi publik di Indonesia. Penelitian secara kuantitatif yang dilakukan September-Desember 2008 itu menunjukkan, Kota Yogyakarta memiliki IPK paling tinggi (6,43), disusul Palangkaraya (6,1) dan Kupang (2,97).

Tentang indeks suap, posisi teratas ditempati polisi (48 persen), yang disusul Bea dan Cukai (41 persen) dan kantor imigrasi (34 persen).

"Apa yang dilakukan TII dengan tampilan (hasil survei) itu membuka kepada kami, termasuk instansi pemerintah, untuk segera membenahi area-area yang dikritisi bahwa di sana masih sangat penuh dengan korupsi dan suap. Meski, itu baru persepsi," kata Gunawan.

Pejabat Fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Insan Fahmi mengatakan, hasil survei seperti yang dilakukan TII membantu kinerja KPK untuk memetakan instansi mana saja yang korup.

Bahkan, lanjutnya, TII dan lembaga lain nantinya diharapkan bisa bersinergi dengan KPK untuk melakukan riset bersama dalam melihat kantong-kantong



Hasil survei TII mengingatkan instansi pemerintah untuk segera membenahi area-area yang dikritisi.

korupsi di Tanah Air, walaupun ada beberapa hasil (survei TII) yang agak berbeda dengan hasil survei KPK. Gorontalo, misalnya, menurut survei KPK, integritasnya terbaik.

Akuntabel

Hasil survei TII membawa semangat baru bagi Pemerintah Kota Yogyakarta. Bukan saja karena upaya membentuk pemerintahan yang transparan telah dilakukan, tetapi juga menjadi tantangan untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto menyadari bahwa perubahan paradigma yang dikehendaki

anak bangsa, yakni reformasi, harus direspons oleh pemerintah daerah dengan perilaku yang lebih akuntabel.

"Sejak lama saya mengajak pegawai akuntabel. Tapi, sebelum itu, saya tekankan dulu bahwa kita harus mulai dengan transparansi. Jika saya mengajak transparan, maka mau tidak mau seseorang akan menjadi akuntabel dengan sendirinya," kata Herry meyakinkan.

Untuk membentuk pemerintahan yang akuntabel, menurut Herry, bisa ditempuh beberapa cara. Salah satunya, memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperbaiki kondisi yang ada.

"Dukungan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dipercaya. Karena itulah, saya dan jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta tidak pernah alergi kritik," tambah Herry.

"Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didukung masyarakat. Jika ada yang tidak benar, ya masyarakat harus berani melapor. Tapi, jika pemerintah sudah benar, masyarakat jangan justru mengajak salah," kata Herry lagi. (WER)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 April 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005